

BAB

I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan konsep multidimensional yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Secara umum, pembangunan dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Konsep pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta keadilan dan pemerataan.

Pada awal perkembangannya, konsep pembangunan lebih banyak diartikan sebagai pembangunan ekonomi yang diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan industrialisasi. Paradigma ini dikenal sebagai pendekatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth oriented development*). Namun, pendekatan tersebut dinilai memiliki berbagai kelemahan karena sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara berkembang.

Seiring dengan kritik terhadap pendekatan tersebut, konsep pembangunan kemudian berkembang ke arah pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*). Pembangunan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses akumulasi modal dan peningkatan produksi, melainkan sebagai upaya memperluas pilihan dan kemampuan manusia untuk hidup secara layak dan bermartabat. Perspektif ini menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Konsep pembangunan manusia (*human development*) menjadi salah satu paradigma penting dalam pembangunan modern. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari indikator ekonomi, tetapi juga dari capaian sosial seperti angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan ini tercermin dalam penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator utama pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia (United Nations Development Programme, 2020), (Kementerian PPN/Bappenas., 2021).

Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan global seperti kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, setiap proses pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk tercapainya tujuan Nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan Nasional karena masyarakat Indonesia banyak yang masih tinggal di daerah pedesaan. Selain itu posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan Negara karena desa menjadi dasar dan identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. Pembangunan desa merupakan bagian fundamental dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Desa memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia karena sebagian besar penduduk masih tinggal dan menggantungkan hidupnya pada wilayah pedesaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh efektivitas pembangunan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan dan pembangunan.

Secara konseptual, pembangunan desa dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, maupun lingkungan. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa bersifat multidimensional dan menuntut pendekatan yang holistik. Berdasarkan publikasi terkait dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada tahun 2018 sebagian besar desa yang berada di Indonesia berada dalam kategori desa berkembang yakni sebanyak 54.879 desa atau 74,49 persen. Sedangkan desa mandiri sebesar 5.559 desa atau 7,55 persen dan masih banyak terdapat desa tertinggal berjumlah 13.232 desa atau 17,96 persen. Sebaran desa tertinggal banyak terdapat di Pulau Papua yaitu sebanyak 6.305 desa yang persentasenya mencapai 8,36 persen. Selain itu, hasil IPD juga menunjukkan capaian yang beragam diantara lima dimensi standar pelayanan minimum pada tingkat desa (Farida, 2022).

Pembangunan desa yang terletak di daerah pinggiran tidak dapat dilakukan secara sendiri, berbagai koordinasi guna berupaya Bersama sangat penting dalam hal pembangunan desa, seperti halnya pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi dalam menjalankan program pengembangan prukades dan Badan Milik Desa (Bumdes). Program yang melalui Dana Desa (DD) ini bukan hal yang pertama di Indonesia. Namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia (Khanifah, 2022). Ketika kita mencermati terkait dengan Bumdes hal tersebut tidak luput terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 39 Tahun 2010. Dari peraturan tersebut menyatakan Bumdes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, yang mana terkait dengan kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan secara Bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes sendiri juga memiliki tujuan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintah sekaligus mendorong meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa (Mundus, 2025).

Bumdes yang berada di Kabupaten Mojokerto berkembang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan potensi wisata serta ekonomi lokal. Sehingga karakteristik secara umum Bumdes di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Aspek	Karakteristik
Bidang Usaha	Wisata Desa, Pengelolaan Air Minum, Bank sampah, Perdagangan, UMKM, Pertanian
Model Tata Kelola	Kolaboratif (desa-masyarakat-Bumdes)
Fokus	Peningkatan PADes dan Pemberdayaan ekonomi lokal

Tantangan	SDM, akuntabilitas laporaan keuangan, inovasi usaha
Kekuatan	Potensi wisata Trawas dan Ngoro, Kawasan industry NIP.

Gambar tabel 1: Karakteristik Bumdes Kabupaten Mojokerto

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada desa wisata. Seperti banyak diketahui desa wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto yaitu taman ghanjaran, dan sumber gempong yang terletak di Kecamatan Trawas banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal Mojokerto atau luar Kabupaten Mojokerto (Muhaimin, 2019). Desa wisata yang berada di Kecamatan Trawas yang dikelola oleh Bumdes ini beberapa kali telah mendapatkan penghargaan secara nasional, tidak sampai situ saja Wakil Presiden Gibran pernah mengunjungi desa wisata yang terletak di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas (Mada, 2024). Penelitian ini tidak berada di Kecamatan Trawas, melainkan desa wisata berada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang juga dikelola oleh Bumdes. Desa wisata ini menarik untuk diulas hal ini dikarenakan sebagai pendapatan masyarakat desa, Pendapatan Asli Desa (PADes), dan tata Kelola kolaboratif khususnya berada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti membangun rumusan masalah sebagai berikut

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang diatas peneliti memiliki rumusan masalah

1. Bagaimana tata Kelola pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis dan mendeskripsikan tata Kelola pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola desa wisata.
2. Menambah referensi empiris terkait pengelolaan desa wisata berbasis keberlanjutan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mojokerto.